

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022

DINAS PUPRPERKIM KAB. BALANGAN



ALAMAT : JL. A. YANI KM.4 NO.14 KEL. BATUPIRING KEC. PARINGIN SELATAN

KODE POS 71600

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang selanjutnya disebut sebagai Renja SOPD merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 27 Tahun 2014, dimana RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) dapat direvisi dan diubah dalam hal ini dikatakan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga sesuai dengan hirarki perencanaan maka harus dan perlunya disusun Rencana Kerja Perubahan.

Dalam rangka menyikapi perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat khususnya dibidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman serta dengan mempertimbangkan target dan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Renstra SOPD yang harus dicapai pada tahun 2021 maka Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman TA. 2021 perlu dilakukan perubahan/revisi dalam upaya penyesuaian terhadap Rencana Capaian Kinerja SOPD.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021 ini diharapkan kinerja organisasi dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan kualitas SDM Aparat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang berbasis kinerja dapat dicapai secara optimal guna terwujudnya Balangan yang Mandiri dan Sejahtera.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat
& Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan



RAHMADIAH, ST, MT

NIP. 19760309 200604 2 007

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022	21
3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas PUPRPERKIM Perubahan Tahun 2022.....	21
3.2 Analisis Sosial Ekonomi	29
BAB IV PENUTUP	31

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SOPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan dan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi SOPD, Rencana Kerja SOPD merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SOPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2022.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2022 adalah:

- a. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini
- b. Perubahan karena adanya varian SiLPA
- c. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

- d. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- e. Adanya pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

B. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
3. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 -2025.
4. PERMENDAGRI 13/2006 BAB VIII tentang PERUBAHAN APBD.
5. PP 58/2005 Bagian Kedua tentang Perubahan APBD.
6. UU32/2004 Paragraf Kedelapan tentang Perubahan APBD.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja perubahan (Renja – P) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai rencana kegiatan/program pembangunan, kebijakan serta prioritas kegiatan di bidang sumber daya air (SDA), air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan

permukiman untuk perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tahun 2022 ini adalah sebagai penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2022. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2022, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja SOPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021
Berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja sampai triwulan II tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Berisi tentang program dan kegiatan baru pada rencana kerja perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

- Capaian Kinerja Sampai Dengan Juni Tahun 2022

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan pada tahun 2022 mencakup 13 Program, 24 Kegiatan dan 52 sub kegiatan. Program, Kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka terealisasinya sasaran strategik.

Uraian selengkapnya capaian kinerja perindikator sampai dengan bulan Juni 2022 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran : Rp. 25.360.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.610.000,- (37,89%) dan sisa anggaran Rp. 15.750.000,-

Realisasi kinerja: Untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2023.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Pagu anggaran : Rp. 7.946.112.363,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.291.222.915,- (41,42%) dan sisa anggaran Rp. 4.654.889.448,-

Realisasi kinerja: Untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi capaian kinerja sebesar 58,33% yang terdiri dari pembayaran gaji ASN dan tunjangan ASN.

Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

Pagu anggaran : Rp. 5.003.856,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.454.112,- (29,06%) dan sisa anggaran Rp. 3.549.744,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pembayaran BJPS gaji para THL.

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu anggaran : Rp. 129.380.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 52.800.000,- (40,81%) dan sisa anggaran Rp. 76.580.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 33,33% yang terdiri dari penyusunan dokumen laporan keuangan SKPD tahun 2021

c. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

Pagu anggaran : Rp. 112.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 34.320.000,- (30,51%) dan sisa anggaran Rp. 78.180.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya realisasi capaian kinerja sebesar 33,33% yang terdiri dari belanja pakaian sasirangan.

Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Pagu anggaran : Rp. 293.213.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 169.504.400,- (57,81%) dan sisa anggaran Rp. 123.708.600,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari terlaksananya para ASN Dinas yang ikut bimtek.

d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu anggaran : Rp. 8.450.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.325.000,- (15,68%) dan sisa anggaran Rp. 7.125.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor

Pagu anggaran : Rp. 44.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.186.000,- (29,97%) dan sisa anggaran Rp. 30.814.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan makanan dan minuman rapat selama 6 bulan.=

Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pagu anggaran : Rp. 288.911.600,- dengan realisasi anggaran Rp. 42.675.900,- (14,77%) dan sisa anggaran Rp. 246.235.700,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor.

Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pagu anggaran : Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.790.000,- (31,58%) dan sisa anggaran Rp. 8.210.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan realisasi capaian kinerja sebesar

50,00% yang terdiri dari belanja langganan surat kabar dan majalan selama 6 bulan.

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pagu anggaran : Rp. 983.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 211.689.560,- (21,53%) dan sisa anggaran Rp. 771.360.440,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah selama 6 bulan.

e. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pagu anggaran : Rp. 610.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 143.817.971,- (23,55%) dan sisa anggaran Rp. 466.982.029,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pembayaran listrik, PDAM dan internet selama 6 bulan.

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Pagu anggaran : Rp. 334.878.800,- dengan realisasi anggaran Rp. 148.431.000,- (44,32%) dan sisa anggaran Rp. 186.447.800,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan alat tulis kantor untuk keperluan kantor selama 6 bulan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu anggaran : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan jumlah anggaran Rp. 402.790.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 144.207.059,- (35,80%) dan sisa anggaran Rp. 258.582.941,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari penyediaan bahan bakar minyak, penggantian suku cadang dan belanja servis kendaraan operasional dinas selama 6 bulan.

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Pagu anggaran : pemeliharaan perakatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 51.500.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 16.030.000,- (31,13%) dan sisa anggaran Rp. 35.470.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pemeliharaan peralatan kantor selama 6 bulan.

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pagu anggaran : pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 178.869.500,- dengan realisasi anggaran Rp. 88.950.000,- (49,73%) dan sisa anggaran Rp. 89.919.500,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari pemeliharaan gedung kantor selama 6 bulan.

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya

Pagu anggaran : Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya Rp. 100.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran Rp. 100.000.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

Pagu anggaran : Pembangunan embung dan penampung air lainnya Rp. 594.720.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.240.000,- (1,55%) dan sisa anggaran Rp. 585.480.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembangunan embung dan penampung air lainnya realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rp. 6.818.035.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.200.000,- (0,19%) dan sisa anggaran Rp. 6.804.835.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembangunan bangunan perkuatan tebing realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

Pagu anggaran : Rp, 124.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran Rp. 124.000.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Rp. 461.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 85.272.900,- (18,48%) dan sisa anggaran Rp. 376.077.100,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja sebesar 50,00% yang terdiri dari terlaksananya pembinaan pada kelembagaan SDA yang tersusun dalam 6 berkas.

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rp. 550.000.000, dengan realisasi anggaran Rp. 56.566.300,- (10,28%) dan sisa anggaran Rp. 493.433.700,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan peningkatan jaringan irigasi permukaan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi

Pagu anggaran : Sub kegiatan rehabilitasi bendung irigasi Rp. 300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.0,00 (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rehabilitasi bendung irigasi realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan

Pagu anggaran : Sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan Rp. 985.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.500.000,- (1,78%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 968.200.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub Kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa

Pagu anggaran : Sub Rp. 199.340.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 26.820.000,- (13,45%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 172.520.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pagu anggaran: Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Rp. 1.700.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.775.000,- (0,81%) dan sisa anggaran Rp. 1.686.225.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK)

Pagu anggaran : sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAK) Rp. 5.271.118.000- dengan realisasi anggaran Rp. 0,- (0,00%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.271.118.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan (DAK) realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Urusan Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pagu anggaran : Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Rp. 7.312.385.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 105.666.000,- (1,45%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.206.719.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pagu anggaran : Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Rp. 200.440.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 54.643.148,- (27,26%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 145.796.852,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Rp. 9.095.921.000,- dengan realisasi anggaran

Rp. 699.665.544,- (7,69%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.396.255.456,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Rp. 140.807.912,- dengan realisasi anggaran Rp. 61.345.416,-(43,57%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 79.462.496,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara daerah kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota

Pagu anggaran : Sub kegiatan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota Rp. 6.879.122.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.628.955.300,- (23,68%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.250.166.700,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 33,33%.

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

a. Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemeliharaan bangunan dan lingkungan

Pagu anggaran : Sub kegiatan pemeliharaan bangunan dan lingkungan Rp. 1 631.072.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.000.000,- (5,95%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.534.072.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pemeliharaan bangunan dan lingkungan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp. 101.452.748.033,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.553.855.385,- (5,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 95.898.892.648,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rekonstruksi jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp. 5.545.459.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 477.307.800,-(8,61%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 5.068.151.200,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rehabilitasi jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp. 850.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 128.935.180,-(15,17%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 721.264.820,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pembangunan Jembatan Rp. 20.607.079.304,- dengan realisasi anggaran Rp. 667.304.484,- (3,24%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 19.939.774.820,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembangunan jembatan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pemeliharaan rutin jembatan Rp. 350.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.980.000,-(3,71%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 337.020.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00% .

8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi

Pagu anggaran : Sub kegiatan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Rp. 250.003.928,- dengan realisasi anggaran Rp. 40.333.764,-(16,13%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 209.670.164,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan fasilitas sertifikasi tenaga terampil konstruksi realisasi capaian kinerja sebesar 25,00%.

b. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional

Pagu anggaran : Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitas Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Rp. 28.011.072,- dengan realisasi anggaran Rp. 13.859.400,- (49,48%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.151.672,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan dukungan/fasilitas penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional realisasi capaian kinerja sebesar 33,33%

Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pagu anggaran : Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi Rp. 221.985.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 17.860.000,- (33,33%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 204.125.000,-

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Rp. 394.720.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.661.250,-(5,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 371.058.750,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 33,33%.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang

Pagu anggaran : Sub kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang Rp. 200.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 32.123.400,- (16,06%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 167.876.600,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan sistem informasi penataan ruang realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Pagu anggaran : Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp. 400.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 115.649.417,-(28,91%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 284.350.583,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang realisasi capaian kinerja sebesar 50,00%.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

a. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota

Sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota

Pagu anggaran : Sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota Rp. 156.030.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.361.500,- (15,16%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 131.668.500,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota

Sub kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Pagu anggaran : Sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rp. 335.699.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.476.000,- (10,57%) dan sisa anggaran sebesar Rp.300.223.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana

Pagu anggaran : Sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana Rp. 309.277.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.723.000,- (15,11%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 262.554.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan pembangunan rumah bagi korban bencana realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

a. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub kegiatan Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Pagu anggaran : Sub kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Rp. 209.658.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.237.134,- (13,47%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 181.420.866,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

b. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU

Pagu anggaran : Sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU Rp. 1.180.444.450,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.805.000,- (1,51%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.162.639.450,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

a. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

Pagu anggaran : Sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha Rp. 2.267.609.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.630.000,- (0,65%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.252.979.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%.

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

a. Urusan penyelenggaraan PSU perumahan

Sub kegiatan Perencanaan penyediaan PSU perumahan

Pagu anggaran : Sub kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan Rp. 127.685.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.268.000,- (8,04%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 117.417.000,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan perencanaan penyediaan PSU perumahan realisasi capaian kinerja sebesar 0,00%

Sub kegiatan Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum diperumahan untuk menunjang fungsi hunian

Pagu anggaran : Sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian Rp. 45.169.881.967,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 277.864.500,- (0,62%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 44.892.017.467,-

Realisasi kinerja : Untuk sub kegiatan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian realisasi capaian kinerja sebesar Rp.0,00%.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2022

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PUPRPERKIM Perubahan Tahun 2022

Adapun program kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 25.360.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.7.500.000,-

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 7.946.112.363,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp.5.637.662,-

Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.003.856,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak 522.720,-

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 129.380.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 21.120.000,-

Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 112.500.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 316.000.000,-

Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 293.213.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 328.858.000,-

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 8.450.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.376.900.000,-

Sub kegiatan 'Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 44.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 55.050.000,-

Sub kegiatan 'Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 288.911.600,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 110.740.800,-

Sub kegiatan 'Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 12.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 7.400.000,-

Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 983.050.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 336.015.000,-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 2.668.000,-

Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 8.589.395.000,-

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 51.750.000,-

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 610.800.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 48.300.000,-

Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 334.878.800,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 711.525.000,-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 402.790.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 259.260.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 51.500.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 63.000.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 178.869.500,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 949.190.000,-

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 100.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 438.220.000,-

Sub kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 594.720.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 357.180.000,-

Sub kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 6.818.035.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 9.340.695.600,-

Sub kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 124.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 147.192.900,-

Sub kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 233.776.500,-

Sub kegiatan 'Normalisasi/Restorasi Sungai dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.451.600.000,-

Sub kegiatan 'Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 461.350.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 39.355.000,-

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 550.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.100.290.000,-

Sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 300.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.250.000,-

Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 985.700.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 152.280.000,-

Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 199.340.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 8.130.000,-

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.700.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 5.097.430.000,-

Sub kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.271.118.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Kegiatan 'Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 7.312.385.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 3.923.926.000,-

Sub Kegiatan Oprasional dan Pemeliharaan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 200.440.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 257.942.000,-

5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Kegiatan 'Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 9.095.921.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 9.617.371.943,-

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 140.807.912,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 221.242.310,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan ubah suai Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 6.879.122.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 4.681.420.000,-

6. **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.631.072.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 7.514.903.000,-

7. **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
Kegiatan 'Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.318.391.000,-

Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 101.452.748.033,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 24.568.106.000,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 5.545.459.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 27.532.738.020,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 850.200.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 119.298.960,-

Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 20.607.079.304,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 8.269.657.410,-

Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 0,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 1.190.810.000,-

Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 350.000.000,- dan setelah perubahan tidak terjadi penambahan maupun pengurangan anggaran.

8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Kegiatan 'Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 250.003.928,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 100.000.000,-

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)

Sub Kegiatan Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 28.011.072,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 60.000.000,-

Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 221.985.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 2.340.000.000,-

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Kegiatan 'Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 394.720.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 383.959.750,-

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 200.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 348.877.800,-

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 400.000.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 194.163.200,-

10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 156.030.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 7.983.600,-

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 335.699.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 30.600.000,-

Sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 309.277.000,- dan setelah perubahan terjadi pengurangan sebanyak Rp. 9.000.000,-

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan 'Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 209.658.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 10.206.900,-

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 1.180.444.450,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 212.258.000,-

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 2.267.609.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 67.960.100,-

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU

Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 127.685.000,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 3.040.000,-

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana , dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan anggaran sebelum perubahan Rp. 45.169.881.967,- dan setelah perubahan terjadi penambahan sebanyak Rp. 28.256.483.550,-

3.2. Analisis Sosial Ekonomi

Dalam dokumen perencanaan Renstra, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan memiliki tujuan dan sasaran “ Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur public dan Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman “ dimana didalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut Dinas PUPRPERKIM menggunakan beberapa program diantaranya program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang mana ketiga program itu sasaran langsung untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan. Untuk program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh sasaran nya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang dilakukan Dinas

PUPRPERKIM didalam program itu adalah bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang dilakukan Dinas PUPRPERKIM dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Balangan yaitu dengan membangun prasarana sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sedangkan untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan Dinas PUPRERKIM adalah melakukan penambahan sambungan rumah untuk ketersediaan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB IV

PENUTUP

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2022 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2022. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2022 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Balangan serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup

Pemerintah Kabupaten Balangan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Paringin, Agustus 2022
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Kabupaten Balangan



RAHMADIAH,ST,MT
Pembina
NIP. 19760309 200604 2 007

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2022
KABUPATEN BALANGAN**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Jumlah Program : 13
 Jumlah Kegiatan : 25
 Jumlah Sub Kegiatan : 59
 Pagu Total Sebelum Perubahan : 233.847.320.785
 Pagu Total Setelah Perubahan : 389.080.454.510

Kode		Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2021												SKPD Penanggung jawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	1/2/3		
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11	(14)	(15)	(16)		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										184,091,036,368	310,805,837,943	126,714,801,575	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	65,50	65,50	11,426,819,119	27,236,383,301	15,809,564,182	ABPD II	ABPD II			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 dokumen	2 dokumen	25,360,000	32,860,000	7,500,000	ABPD II	ABPD II			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	2 dokumen	2 dokumen	25,360,000	32,860,000	7,500,000	ABPD II	ABPD II			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	14 bulan	14 bulan	8,080,496,219	8,107,776,601	27,280,382	ABPD II	ABPD II			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	14 bulan	14 bulan	7,946,112,363	7,951,750,025	5,637,662	ABPD II	ABPD II			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah diverifikasi/teruji	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah diverifikasi/teruji	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	5,003,856	5,526,576	522,720	ABPD II	ABPD II			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	3 dokumen	3 dokumen	129,380,000	150,500,000	21,120,000	ABPD II	ABPD II			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	100%	100%	405,713,000	1,050,571,000	644,858,000	ABPD II	ABPD II			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	Pegawai Dinas PUPRPERKIM	150 stel	830 stel	112,500,000	428,500,000	316,000,000	ABPD II	ABPD II			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	ASN Dinas PUPRPERKIM	50 orang	80 orang	293,213,000	622,071,000	328,858,000	ABPD II	ABPD II			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	100%	100%	1,336,411,600	3,222,517,400	1,886,105,800	ABPD II	ABPD II			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	3 buah	13 paket	8,450,000	1,385,350,000	1,376,900,000	ABPD II	ABPD II			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	44,000,000	99,050,000	55,050,000	ABPD II	ABPD II			
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	288,911,600	399,652,400	110,740,800	ABPD II	ABPD II			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	12,000,000	19,400,000	7,400,000	ABPD II	ABPD II			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	983,050,000	1,319,065,000	336,015,000	ABPD II	ABPD II			

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Dinas PUPRPERKIM		Dinas PUPRPERKIM		100%		11,309,145,000	11,309,145,000	ABPD II	ABPD II	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		Dinas PUPRPERKIM		Dinas PUPRPERKIM		11 unit		2,668,000,000	2,668,000,000	ABPD II	ABPD II	
	Pengadaan Alat Besar		Jumlah Alat Berat yang diadakan		Dinas PUPRPERKIM		Dinas PUPRPERKIM		4 unit		8,589,395,000	8,589,395,000	ABPD II	ABPD II	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebeler kantor yang diadakan		Dinas PUPRPERKIM		Dinas PUPRPERKIM		1 paket		51,750,000	51,750,000	ABPD II	ABPD II	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	100%	100%	945,678,800	1,608,903,800	663,225,000	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	610,800,000	562,500,000	-48,300,000	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	334,878,800	1,046,403,800	711,525,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	100%	100%	633,159,500	1,904,609,500	1,271,450,000	ABPD II	ABPD II
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	402,790,000	662,050,000	259,260,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Pelaksanaan Perengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	51,500,000	114,500,000	63,000,000	ABPD II	ABPD II
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	Dinas PUPRPERKIM	12 bulan	12 bulan	178,869,500	1,128,059,500	949,190,000	ABPD II	ABPD II
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	24,20	24,20	10,133,145,000	23,298,145,000	13,165,000,000	ABPD II	ABPD II
		Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	12,41	12,41				ABPD II	ABPD II
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	12,41%	12,41%	8,098,105,000	20,017,415,000	11,919,310,000	ABPD II	ABPD II
	Penyusunan rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun	rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun	rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	5 Dokumen	100,000,000	538,220,000	438,220,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 ha	2,80 Ha	594,720,000	951,900,000	357,180,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	750 meter	1750 meter	6,818,035,000	16,158,730,600	9,340,695,600	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 buah	1 buah	124,000,000	271,192,900	147,192,900	ABPD II	ABPD II
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	12 berkas	12 Berkas	461,350,000	421,995,000	-39,355,000	ABPD II	ABPD II
	Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan			223,776,500	223,776,500		ABPD II	ABPD II
	Normalisasi/ Restorasi sungai	Panjang Sungai yang di Normalisasi/ di Restorasi	Panjang Sungai yang di Normalisasi/ di Restorasi		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan			1,451,600,000	1,451,600,000		ABPD II	ABPD II
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	24,2%	24,2%	2,035,040,000	3,280,730,000	1,245,690,000	ABPD II	ABPD II
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	500 meter	500 meter	550,000,000	1,650,290,000	1,100,290,000	ABPD II	ABPD II
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Bendung Irigasi yang yang direhabilitasi	Bendung Irigasi yang yang direhabilitasi		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 buah	2 buah	300,000,000	301,250,000	1,250,000	ABPD II	ABPD II
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	6 paket	7 lokasi	985,700,000	1,137,980,000	152,280,000	ABPD II	ABPD II
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa		Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 paket	1 lokasi	199,340,000	191,210,000	-8,130,000	ABPD II	ABPD II

	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	82,27	82,27	6,971,118,000	12,068,548,000	5,097,430,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	82,27	82,27	6,971,118,000	12,068,548,000	5,097,430,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang terbangun di kawasan perdesaan	Jumlah SR yang terbangun di kawasan perdesaan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	280 SR	650 SR	1,700,000,000	6,797,430,000	5,097,430,000	ABPD II	ABPD II	
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan	1006 SR	1006 SR	5,271,118,000	5,271,118,000		DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	92,75	92,75	7,512,825,000	11,694,693,000	4,181,868,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	92,75	92,75	7,512,825,000	11,694,693,000	4,181,868,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	665 unit	915 unit	7,312,385,000	11,236,311,000	3,923,926,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 unit	1 unit	200,440,000	458,382,000	257,942,000	ABPD II	ABPD II	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	89,49	89,49	16,115,850,912	30,635,885,165	14,520,034,253	ABPD II	ABPD II	
	Penyelenggaraan bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	10 buah	43 buah	16,115,850,912	30,635,885,165	14,520,034,253	ABPD II	ABPD II	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	7 unit	20 unit	9,095,921,000	18,713,292,943	9,617,371,943	ABPD II	ABPD II	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Monitoring	Dokumen Monitoring	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	1 dokumen	140,807,912	362,050,222	221,242,310	ABPD II	ABPD II	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang direhab	Jumlah bangunan gedung yang direhab	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 unit	23 unit	6,879,122,000	11,560,542,000	4,681,420,000	ABPD II	ABPD II	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	Jumlah Bangunan yang ditata	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 buah	12 buah	1,631,072,000	9,145,975,000	7,514,903,000	ABPD II	ABPD II	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	Jumlah Bangunan yang ditata	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 buah	12 buah	1,631,072,000	9,145,975,000	7,514,903,000	ABPD II	ABPD II	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	Jumlah Bangunan yang di pelihara	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 unit	12 unit	1,631,072,000	9,145,975,000	7,514,903,000	ABPD II	ABPD II	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	66,07	66,07	128,805,486,337	191,804,487,727	62,999,001,390	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	80,06	80,06						
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	44,48 km	74,32 km	128,805,486,337	191,804,487,727	62,999,001,390	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	panjang jalan yang di rekonstruksi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	43,43 km	54,02 km	101,452,748,033	126,020,854,033	24,568,106,000	DAK dan APBD II	DAK dan APBD II	
	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	panjang jalan yang di rehabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	0,8 Km	2,8 km	5,545,459,000	33,078,197,020	27,532,738,020	ABPD II	ABPD II	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	0,25 meter	0,25 meter	850,200,000	969,498,960	119,298,960	ABPD II	ABPD II	
	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	panjang jembatan yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	182 meter	194 meter	20,607,079,304	28,876,736,714	8,269,657,410	ABPD II	ABPD II	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	5 meter	5 meter	350,000,000	350,000,000		ABPD II	ABPD II	
	Rehabilitasi jembatan	panjang jembatan yang di rehabilitasi	panjang jembatan yang di rehabilitasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	0	0		1,190,810,000	1,190,810,000	ABPD II	ABPD II	
	Pembangunan jalan	panjang jalan yang dibangun	panjang jalan yang dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	0	0		1,318,391,000	1,318,391,000	ABPD II	ABPD II	

Dinas
PUPRPERKIM

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	45	45	500,000,000	3,000,000,000	2,500,000,000	ABPD II	ABPD II
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100 orang	334 orang	250,003,928	350,003,928	100,000,000	ABPD II	ABPD II
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100 orang	100 orang	250,003,928	350,003,928	100,000,000	ABPD II	ABPD II
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUJK	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUJK	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	30 IUJK	30 IUJK	249,996,072	2,649,996,072	2,400,000,000	ABPD II	ABPD II
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	28,011,072	88,011,072	60,000,000	ABPD II	ABPD II
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	30 orang	334 orang	221,985,000	2,561,985,000	2,340,000,000	ABPD II	ABPD II
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	42	42	994,720,000	1,921,720,750	927,000,750	ABPD II	ABPD II
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 dok	4 dok	394,720,000	778,679,750	383,959,750	ABPD II	ABPD II
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	Jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 dokumen	4 dokumen	394,720,000	778,679,750	383,959,750	ABPD II	ABPD II
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 dokumen	4 dok	200,000,000	548,877,800	348,877,800	ABPD II	ABPD II
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah bahan informasi penataan ruang	Jumlah bahan informasi penataan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	3 dokumen	4 dokumen	200,000,000	548,877,800	348,877,800	ABPD II	ABPD II
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 dok	3 dok	400,000,000	594,163,200	194,163,200	ABPD II	ABPD II
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	Jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2 dokumen	3 dokumen	400,000,000	594,163,200	194,163,200	ABPD II	ABPD II
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									49,756,284,417	78,274,616,567	28,518,332,150	ABPD II	ABPD II
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	100%	100%	801,006,000	769,389,600	-31,616,400	ABPD II	ABPD II
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	1 dokumen	156,030,000	164,013,600	7,983,600	ABPD II	ABPD II
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	1 dokumen	156,030,000	164,013,600	7,983,600	ABPD II	ABPD II
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	17 unit	17 unit	644,976,000	605,376,000	-39,600,000	ABPD II	ABPD II
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	11 unit	11 unit	335,699,000	305,099,000	-30,600,000	ABPD II	ABPD II
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	6 unit	6 unit	309,277,000	300,277,000	-9,000,000	ABPD II	ABPD II
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	78,49	78,49	1,390,102,450	1,612,567,350	222,464,900	ABPD II	ABPD II
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	78,49%	78,49%	209,658,000	219,864,900	10,206,900	ABPD II	ABPD II
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	Jumlah dokumen yang dibuat	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	1 dokumen	209,658,000	219,864,900	10,206,900	ABPD II	ABPD II

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	luas kawasan kumuh yang tertangani	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	2, 1 ha	2, 1 ha	1,180,444,450	1,392,702,450	212,258,000	ABPD II	ABPD II
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Panjang drainase dibangun	Panjang drainase dibangun	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	284 M2	284 M2	1,180,444,450	1,392,702,450	212,258,000	ABPD II	ABPD II
	Panjang jalan yang dibangun	Panjang jalan yang dibangun					269 M2	269 M2					
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	95%	95%	2,267,609,000	2,335,569,100	67,960,100	ABPD II	ABPD II
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	65%	65%	2,267,609,000	2,335,569,100	67,960,100	ABPD II	ABPD II
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	110 unit	112 unit	2,267,609,000	2,335,569,100	67,960,100	ABPD II	ABPD II
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	85%	85%	45,297,566,967	73,557,090,517	28,259,523,550	ABPD II	ABPD II
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	85%	85%	45,297,566,967	73,557,090,517	28,259,523,550	ABPD II	ABPD II
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1 dokumen	1 dokumen	127,685,000	130,725,000	3,040,000	ABPD II	ABPD II
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	Kab.Balangan	1500 unit	7500 unit	45,169,881,967	73,426,365,517	28,256,483,550	ABPD II	ABPD II

FORM 1

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD

TAHUN 2022

NAMA SKPD

: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH PAGU			JUMLAH PROGRAM BARU	JUMLAH KEGIATAN BARU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RENJA 2022	DPA APBD 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	DPA APBD 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	DPA APBD 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3	13=8-6	14
	<i>Wajib Pelayanan Dasar</i>	13	13	13	24	24	25	233,847,320,785	233,847,320,785	389,080,454,510	0	1	<i>DISPUPRPERKIM</i>

Kepala Dinas

RAHMADIAH, ST,MT
NIP.19760309 200604 2 007

FORM 2

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2022

NAMA SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		
		SEMULA	MENJADI		RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	RENJA 2022	RENJA 2022 PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				184,091,036,368	310,805,837,943	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	65,50	65,50	11,426,819,119	27,236,383,301	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	2 dokumen	2 dokumen	25,360,000	32,860,000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	25,360,000	32,860,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	14 bulan	14 bulan	8,080,496,219	8,107,776,601	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan	14 bulan	14 bulan	7,946,112,363	7,951,750,025	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen usulan pencairan anggaran Keuangan yang telah terverifikasi/teruji	12 bulan	12 bulan	5,003,856	5,526,576	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	129,380,000	150,500,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	405,713,000	1,050,571,000	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	150 stel	830 stel	112,500,000	428,500,000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	50 orang	80 orang	293,213,000	622,071,000	

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100%	100%	1,336,411,600	3,222,517,400	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 buah	13 paket	8,450,000	1,385,350,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pelaksanaan Bahan Logistik kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	44,000,000	99,050,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	288,911,600	399,652,400	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	12 bulan	12,000,000	19,400,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	12 bulan	983,050,000	1,319,065,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%		11,309,145,000	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan		11 unit		2,668,000,000	
			Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Berat yang diadakan		4 unit		8,589,395,000	
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang diadakan		1 paket		51,750,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100%	100%	945,678,800	1,608,903,800	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	610,800,000	562,500,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	334,878,800	1,046,403,800	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100%	100%	633,159,500	1,904,609,500	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	12 bulan	402,790,000	662,050,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	12 bulan	51,500,000	114,500,000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	178,869,500	1,128,059,500	

		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi mantap	24,20	24,20	10,133,145,000	23,298,145,000	
				Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41	12,41			
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	12,41%	12,41%	8,098,105,000	20,017,415,000	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun	1 dokumen	5 Dokumen	100,000,000	538,220,000	
3		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	2 unit	2,80 Ha	594,720,000	951,900,000	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	750 meter	1750 meter	6,818,035,000	16,158,730,600	
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang direhab	1 buah	1 buah	124,000,000	271,192,900	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan	12 berkas	12 Berkas	461,350,000	421,995,000	
4			Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun				223,776,500	
			Normalisasi/ Restorasi sungai	Panjang Sungai yang di Normalisasi/ di Restorasi				1,451,600,000	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan	24,2%	24,2%	2,035,040,000	3,280,730,000	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dibangun	500 meter	500 meter	550,000,000	1,650,290,000	
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Bendung Irigasi yang yang direhabilitasi	2 buah	2 buah	300,000,000	301,250,000	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6 paket	7 lokasi	985,700,000	1,137,980,000	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	1 paket	1 lokasi	199,340,000	191,210,000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82,27	82,27	6,971,118,000	12,068,548,000	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	82,27	82,27	6,971,118,000	12,068,548,000	
6		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR yang terbangun di kawasan perdesaan	280 SR	650 SR	1,700,000,000	6,797,430,000	
		Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Jumlah penambahan SR yang terlayani melalui pemanfaatan idle capacity dengan penambahan jaringan perpipaan	1006 SR	1006 SR	5,271,118,000	5,271,118,000	

		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	92,75	92.75	7,512,825,000	11,694,693,000	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik yang layak	92,75	92.75	7,512,825,000	11,694,693,000	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi yang dibangun	665 unit	915 unit	7,312,385,000	11,236,311,000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi yang tersedia	1 unit	1 unit	200,440,000	458,382,000	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,49	89.49	16,115,850,912	30,635,885,165	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Kependidikan	Jumlah Bangunan gedung yang dibangun dan dipelihara	10 buah	43 buah	16,115,850,912	30,635,885,165	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	7 unit	20 unit	9,095,921,000	18,713,292,943	
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Monitoring	1 dokumen	1 dokumen	140,807,912	362,050,222	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata	1 buah	12 buah	1,631,072,000	9,145,975,000	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	1 buah	12 buah	1,631,072,000	9,145,975,000	
		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Bangunan yang di pelihara	1 unit	12 unit	1,631,072,000	9,145,975,000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	66,07	66,07	128,805,486,337	191,804,487,727	
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	80,06	80,06			
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam kondisi mantap	44,48 km	74,32 km	128,805,486,337	191,804,487,727	
		Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi	43,43 km	54,02 km	101,452,748,033	126,020,854,033	
		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi	0,8 Km	2,8 km	5,545,459,000	33,078,197,020	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang di pelihara secara rutin	0,25 meter	0,25 meter	850,200,000	969,498,960	
		Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	panjang jembatan yang dibangun	182 meter	194 meter	20,607,079,304	28,876,736,714	
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang di pelihara secara rutin	5 meter	5 meter	350,000,000	350,000,000	
			Rehabilitasi jembatan	panjang jembatan yang di rehabilitasi		0		1,190,810,000	
			Pembangunan jalan	panjang jalan yang dibangun		0		1,318,391,000	

	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	45	45	500,000,000	3,000,000,000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	334 orang	250,003,928	350,003,928
	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta sertifikasi tenaga terampil konstruksi	100 orang	100 orang	250,003,928	350,003,928
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Izin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan bagi BUJK	30 IUJK	30 IUJK	249,996,072	2,649,996,072
	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK yang diterbitkan	30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	28,011,072	88,011,072
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	30 orang	334 orang	221,985,000	2,561,985,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	42	42	994,720,000	1,921,720,750
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang	3 dok	4 dok	394,720,000	778,679,750
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	jumlah bahan substansi penetapan rtrw yang tersusun.	3 dokumen	4 dokumen	394,720,000	778,679,750
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang	3 dokumen	4 dok	200,000,000	548,877,800
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	jumlah bahan informasi penataan ruang	3 dokumen	4 dokumen	200,000,000	548,877,800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	2 dok	3 dok	400,000,000	594,163,200
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	jumlah dokumen substansi rapat koordinasi	2 dokumen	3 dokumen	400,000,000	594,163,200
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				49,756,284,417	78,274,616,567
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	801,006,000	769,389,600
Dst	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	1 dokumen	1 dokumen	156,030,000	164,013,600
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	156,030,000	164,013,600
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	17 unit	17 unit	644,976,000	605,376,000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	11 unit	11 unit	335,699,000	305,099,000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana yang tertangani	6 unit	6 unit	309,277,000	300,277,000

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	78,49	78,49	1,390,102,450	1,612,567,350	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	78,49%	78,49%	209,658,000	219,864,900	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	209,658,000	219,864,900	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	luas kawasan kumuh yang tertangani	2, 1 ha	2, 1 ha	1,180,444,450	1,392,702,450	
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Panjang drainase dibangun	284 M2	284 M2	1,180,444,450	1,392,702,450	
			Panjang jalan yang dibangun	269 M2	269 M2			
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95%	95%	2,267,609,000	2,335,569,100	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang telah direhab	65%	65%	2,267,609,000	2,335,569,100	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rehabilitasi rumah layak huni bagi MBR yang tertangani	110 unit	112 unit	2,267,609,000	2,335,569,100	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85%	85%	45,297,566,967	73,557,090,517	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	85%	85%	45,297,566,967	73,557,090,517	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen identifikasi PSU Perumahan	1 dokumen	1 dokumen	127,685,000	130,725,000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah rumah yang terlayani jalan dan drainase	1500 unit	7500 unit	45,169,881,967	73,426,365,517	